

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN

By TRIWAHYUNINGSIH

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN

Triwahyuningsih

Pendahuluan

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Namun, di lain pihak sistem demokrasi itu juga tidak bisa dipaksakan dari luar atas suatu masyarakat atau suatu bangsa. Demokrasi dalam suatu masyarakat dapat ditumbuhkan seiring dengan pertumbuhan berbagai aspek ⁵ dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi merupakan *learning process*, yang tumbuh berkembang secara bertahap menuju suatu kematangan demokrasi (Zamroni, 2013 : 32-33).

Menurut Azyumardi Azra (2003: 17) ² kebutuhan mendesak bagi bangsa dalam membangun demokrasi berkeadaban karena beberapa alasan. *Pertama*, meningkatnya gejala dan kecenderungan *political literacy*, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. *Kedua*, meningkatnya *political apathism* yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Pembentukan warga negara yang cerdas secara intelektual, emosional dan social, memiliki keadaban demokratis dan demokratis berkeadaban merupakan tuntutan dan keniscayaan.

Menurut Yudi Latif (Kompas 16 Maret 2015) ⁷ perwujudan demokrasi permusyawaratan sebagai wahana penguatan negara persatuan (yang mengatasi paham perseorangan dan golongan) dan negara kesejahteraan (yang berorientasi keadilan social) tergegat oleh hambatan-hambatan cultural, ¹² institusional dan structural. Secara cultural , politik sebagai teknik mengalami kemajuan, tetapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Pada tingkat institusional demokrasi ⁷ yang ingin memperkuat daulah rakyat

6 justru memperkuat segelintir orang. Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi dan kepuasan dan daulat rakyat justru mengembangkan ketidaksertaan (disengagement), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat. Pada tingkat structural , kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi “liberal” tanpa menyesuainya secara seksama dengan kondisi social-ekonomi masyarakat Indonesia justru dapat melemahkan demokrasi.

Hasil survai Kompas (15 Juli 2013 : 40) tentang “ **Pemilu di mata Pemilih Pemula**” sebanyak 46,67 % jarang berbicara terkait politik. Mayoritas menganggap politik sebagai pembicaraan yang kurang menarik, topic pemilu hanya terdengar sayup-sayup. Para pemilih pemula itu belum paham soal pemilihan umum. Padahal Proklamator kita , Bung Karno sejak lama menempatkan kaum muda sebagai bagian 17 penting dalam pembangunan bangsa dan Negara, karena mereka adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa dan Negara.

Tingginya tingkat partisipasi pemilih dijadikan indikator keberhasilan pemilu. Demokrasi di Indonesia menurut Olle Tornquist dan Kristian Stokke sebagaimana dikutip oleh Lucy Djani (Kompas 11 Maret 2014: 7), mengalami defisit akibat lemahnya representasi politik. Buruknya relasi antara pemilih dan politikus membuat kualitas demokrasi di Indonesia rendah secara substansial.

Urgensi Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik adalah sebuah proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini , para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Pendidikan politik sebagai proses dialogis antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman , penghayatan dan pengamalan

nilai-nilai, norma, symbol politik yang dianggap ideal dan baik (Ramlan Surbakti, 1999:117).

Pendidikan Politik (*political education, political socialization, citizenship training*) yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan akhirnya rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Jika dikaitkan dengan faham kedaulatan rakyat atau demokrasi, maka rakyat harus mampu menjalankan tugas-tugas partisipasi. Di dalam negara demokrasi, idealnya rakyat dididik secara kontinu berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di negara tersebut. (Rusadi Kantaprawira, 1977: 54).

Almond dan Coleman menulis fungsi pendidikan politik “ yang ada dalam setiap sistem politik adalah metode-metode perekrutan dan latihan politik yang menyebabkan kita bertanya” bagaimanakah rakyat direkrut dan dimasyarakatkan ke arah peranan-peranan dan orientasi-orientasi politik dalam sistem politik yang berbeda-beda (Rusadi Kantaprawira, 1977: 56).

Adanya petugas-petugas politik yang berkualitas tinggi hampir selalu merupakan hasil dari pendidikan politik. Sebagaimana dikemukakan Rusadi Kantaprawira (1977: 55):

“ Datangnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas tidak semata-mata merupakan mitos. Dengan demikian masyarakat luas perlu terus ditingkatkan pengetahuannya, agar dapat menjadi insane-insan politik yang sadar atas peranannya, mengetahui hak-haknya dan mempunyai tanggungjawab. Masyarakat harus terbina dan terbiasa untuk memilih hal-hal yang baik/ konstruktif dan meninggalkan hal-hal yang buruk berdasarkan konsepsinya terhadap objek-objek politik yang diyakini kebenarannya atau atas dasar sumber –sumber kekayaan rohani (spiritual resources) yang dimilikinya. Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik, sedemikian rupa harus merata ke semua lapisan masyarakat baik vertical maupun horizontal. Dengan demikian, pengetahuan politik tidak semata-mata merupakan monopoli dari elit saja, walaupun seringkali elit merupakan elemen penggerak yang vital”

Hendak ke mana masyarakat dididik tentang pemikiran-pemikiran politik, masalah-masalah politik, daya tanggap politik sangat erat kaitannya dengan kebudayaan politik dan orientasi-orientasi politik. Menampilkan budaya politik partisipan sangat penting, sebab akan

berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi yang nyata atau demokrasi tidak terbatas wacana. Dalam kenyataan meskipun suatu negara menganut sistem politik demokrasi, seperti Indonesia tidak serta merta kemudian kehidupan politiknya demokratis. Apabila dikaji factor kendalanya antara lain, belum berkembangnya budaya politik partisipan

Seperti dikatakan Aristoteles filosof politik dan Bryce ilmuwan politik yang mendalami demokrasi, intinya mereka sepaham bahwa demokrasi itu dilanjutkan dan dipertahankan oleh warga negara yang aktif dalam urusan politik dan penyebaran informasi yang tinggi mengenai masyarakat serta memiliki tanggung jawab politik yang tinggi. (Cholisin, 2013 : 9). Almond dan Verba menyebutkan budaya politik yang demoktaris, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demoktarik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “ suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Keyakinan akan kemampuan seseorang merupakan kunci bagi sebuah sikap politik, dan keyakinan akan kemampuan tersebut merupakan kunci bagi terbentuk dan terpeliharanya demokrasi. Artinya, warga negara mempunyai keyakinan bahwa mereka memiliki kompetensi untuk terlibat dalam proses politik yang berjalan. Kosekuensi selanjutnya adalah, kalangan pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang memperhatikan kepentingan warga masyarakat. Kalau tidak demikian, warga masyarakat akan mengalami *deprivasi*, sehingga mereka menjadi kecewa dan meninggalkan pemerintah. Masyarakat tidak akan memilih pemimpin yang meninggalkan mereka. Sebaliknya, kalau warga masyarakat merasa kompeten untuk terlibat dalam proses politik, implikasinya adalah peranan pemerintah dalam penyelenggaraan negara menjadi sangat dominan. Rakyat menjadi sasaran dan objek kebijaksanaan pemerintah yang dapat dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. Afan Gaffar (2004:101) .Di similah pentingnya

menampilkan peran serta budaya politik partisipan bagi setiap warga negara, agar pemerintah terkontrol dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kepentingan rakyat.

Menampilkan peran serta budaya politik partisipan atau peran warga negara dalam kehidupan politik, dapat dilakukan pada tingkat makro politik (Pemerintahan tingkat nasional) dan mikro politik (pemerintahan local) seperti pada pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dll. Wujud partisipasi itu misalnya mengkritisi suatu kebijakan, melakukan negosiasi dengan lembaga berwenang, melakukan upaya penekanan lewat unjuk rasa dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam budaya politik partisipan ada unsure kepatuhan terhadap norma, peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan bahwa partisipasi untuk mengkritisi, memecahkan berbagai masalah kehidupan politik disertai tanggung jawab. Tanggung jawab itu dapat diwujudkan apabila dalam penerapannya budaya politik partisipan sesuai dengan nilai-nilai budaya politik Pancasila (Cholisin, 2013 :

10). Nilai-nilai tersebut, antara lain :

1. Religious (bukan sekuler)
2. Bhineka Tunggal Ika (Pluralisme);
3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan Kebangsaan;
4. Ciri kekeluargaan;
5. Gotong Royong;
6. Musyawarah;
7. Cinta kemerdekaan;
8. Cinta tanah air;
9. Cinta persatuan dan kesatuan;
10. Semangat solidaritas.

Lebih lanjut Cholisin, (2013 :10) menuliskan bahwa orang yang berbudaya politik partisipan juga memiliki ciri khas percaya diri untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian setiap warga negara dapat menampilkan peran serta budaya politik partisipan dalam bentuk :

- a. Peran aktif, yakni memberikan masukan, mengkritisi kebijakan public;

- b. Peran positif, mematuhi kebijakan pemerintah;
- c. Peran positif, yakni meminta kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya supaya sebagai warga negara dapat hidup sejahtera;
- d. Peran negative, yakni menolak segala bentuk intervensi pemerintah yang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah urusan pribadi (privasi).

Selanjutnya , berikut contoh konkrit bentuk penampilan peran serta atau penerapan budaya politik partisipan oleh warga negara :

- a. Memberikan masukan dalam pembuatan Perdes, Perda, PP, UU dan amandemen konstitusi;
- b. Memberikan kritik (menunjukkan kebaikan dan kelemahan) dari Perdes, Perda, Kepres, PP, UU dan amandemen konstitusi dalam upaya perubahan dan perbaikan;
- c. Mematuhi Perdes, Perda, Kepres, PP, UU, UUD;
- d. Menolak berbagai perlakuan pemerintah , kebijakan pemerintah yang bersifat intervensi hak-hak privasi atau berakibat tereksplotasinya hak-hak warga negara.

Menurut Alfian dikutip oleh Cholisin (2013 : 4) oleh ada dua factor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang, yaitu sampai berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik, yaitu factor emosional-psikologis yang berasal dari hatinya, kedua factor rasio yang berasal dari otaknya. Seseorang akan menerima nilai-nilai Pancasila bilamana kedua factor itu terpenuhi secara memuaskan, yaitu baik secara emosional-psikologis hatinya menerima nilai-nilai itu, sebagai cocok, dengan dirinya, maupun secara rasional akal sehat otaknya juga menerimanya sebagai sesuatu yang sesuai dengan dirinya.

Menurut Rusadi Kantaprawira pendidikan politik dapat diselenggarakan a.l melalui :

1. Bahan-bahan yang dapat dibaca (readable, legible) seperti surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang bisa membentuk pendapat umum;
2. Siaran seperti radio yang dapat didengar (audable) dan televisi serta film yang dapat dilihat dan didengar (bersifat audio visual)
3. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi dalam masyarakat seperti di masjid, gereja serta pendidikan formal dan nonformal. (1977: 56).
4. Berkembangnya teknologi informasi semakin mempermudah masyarakat untuk menambah wawasan tentang pengetahuan politik, seperti melalui internet, web dengan berbagai variasinya yang sifatnya *on line*.

Demokrasi Berkeadaban

Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; *kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Azyumardi Azra, 2003 : 109-110).

Pengertian demokrasi itu sendiri dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. (Azyumardi Azra, 2003: 110).

Sementara itu jika ditelusuri dari sisi terminologis terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan demokrasi, diantaranya yaitu pendapat *Sidney Hook* yang dikutip oleh Azyumardi Azra (2003: 110) menyatakan bahwa “demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”.¹⁵ Sedangkan menurut *Philippe C. Schmitter* dan *Terry Lynn Karl*, “demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih” (Azyumardi Azra, 2003: 110). Dan menurut pendapat *Henry B. Mayo* yang dikutip oleh Miriam Budiardjo (2009 : 117) menyatakan bahwa:

“sistem politik yang demokratis merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”¹⁴

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah diambil atas dasar kesepakatan bersama dan prinsip kesamaan politik.

Menurut Azyumardi Azra (2003: 79-80) ,⁵ untuk membangun tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang demokratis pula. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai demokrat, yakni antara lain sebagai berikut :

- a. Rasa hormat dan tanggung jawab;
- b. Bersikap kritis;
- c. Membuka diskusi dan dialog;
- d. Bersikap terbuka;
- e. Rasional;
- f. Adil
- g. Jujur

Beberapa karakteristik warga negara yang demokratis tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara otonom yakni mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara mandiri. Lebih lanjut Asyumardi Azra (2003 : 81-82) Sebagai warga negara otonom, warga negara mempunyai karakteristik lanjutan, yaitu :

- a. Memiliki kemandirian, tidak mudah dipengaruhi, dimobilisasi, teguh pendirian, dan bersikap kritis pada segenap keputusan politik;
- b. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara;
- c. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi;
- d. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun;
- e. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat Tidak ada demokrasi tanpa aturan hukum dan konstitusi. Karena itu, warga negara yang otonom harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional yaitu :
 - (1) Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (*culture of law*)
 - (2) Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (*process of law making*)
 - (3) Mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsive (*content of law*)
 - (4) Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggungjawab.

Pada sisi lain Yudi Latif (2012 : 475) mengatakan bahwa :

“ Demokrasi dalam alam pikiran Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian dan cita-cita nasional. Dalam pandangan Soekarno, jika demokrasi sekedar alat teknis, pada dasarnya tidaklah berbeda dengan nasional-sosialisme (fasisme), maupun dictator proletariat, yakni sekedar alat untuk mencapai bentuk masyarakat yang dicita-citakan, entah masyarakat kapitalis, sosialis maupun yang lain.”

Demikian pula dikatakan Adnan Buyung Nasution (2011: 3): demokrasi bukan hanya cara, alat atau proses, tetapi adalah nilai-nilai atau norma-norma yang harus menjiwai dan mencerminkan keseluruhan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan hanya kriteria di dalam merumuskan cara atau proses untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiri harus mengandung nilai-nilai

demokrasi. Artinya, demokrasi tidak pernah boleh dinomorduakan di bawah tujuan yang luhur sekalipun (peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat).

Selanjutnya dijelaskan Yudi Latif (2012 : 475-476) bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebutkan dalam sila keempat Pancasila, ¹³ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung beberapa ciri dari alam pemikiran demokrasi di Indonesia, yaitu :

- (1) kerakyatan (daulat rakyat);
- (2) permusyawaratan (kekeluargaan);
- (3) hikmat kebijaksanaan

³ Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan member jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”

⁸ Cita hikmat kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila. Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsesual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif

sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh “mayorokrasi” dan “minorokrasi”.

Dalam demokrasi permusyawaratan, sesuatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya 4 prasyarat; a). Didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subyektifitas ideologis dan kepentingan b). Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang bukan demi kepentingan perorangan atau golongan c). Berorientasi jauh kedepan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negative) d). Bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan semua pihak (minoritas terkecilpun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi dan konsesus secara bermutu dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan manapun akan merasa ikut memiliki, loyal dan bertanggung jawab atas segala keputusan politik. Atas dasar itu, pemungutan suara (voting) harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itupun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati. Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan (kekeluargaan). Kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari perbedaan aneka gugus kebangsaan diperkuat melalui pemuliaan nilai-nilai keadilan (Yudi Latif, 2012 : 477-480).

Daftar Pustaka

- Adnan Buyung Nasution. 2011. *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*. Jakarta Kompas Media Nusantara
- Afan Gaffar. 2004. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Cholisin. 2013. *Budaya Politik*. Jogjakarta PKn H Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jogjakarta.
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ramlan Surbakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Rusadi Kantaprawira. 1977. *System Politik Indonesia*. Bandung: Tribisana Karya.
- Yudi Latif. 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multi Kultural*. Jogyakarta : Ombak.

Kompas, 15 juli 2013

_____ 11 Maret 2014

_____ 16 Maret 2015

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERKEADABAN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----|---|---------------|
| 1 | papuapost.com Internet | 69 words — 3% |
| 2 | endangkomarasblog.blogspot.com Internet | 65 words — 2% |
| 3 | inisiatif.org Internet | 54 words — 2% |
| 4 | ilmuhukum.umsb.ac.id Internet | 44 words — 2% |
| 5 | ethanabeti.wordpress.com Internet | 43 words — 2% |
| 6 | acch.kpk.go.id Internet | 37 words — 1% |
| 7 | www.blokberita.com Internet | 34 words — 1% |
| 8 | ansortuban.org Internet | 29 words — 1% |
| 9 | Ahmad Anis Abdullah, Suhartini Suhartini. "Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Statistika Berbasis Pendidikan Politik Di Lingkungan Sekolah", Jurnal Gantang, 2017 Crossref | 23 words — 1% |
| 10 | muhammadazzikra15.blogspot.com | |

Internet

18 words — 1%

11 prezi.com
Internet

18 words — 1%

12 harian-oftheday.blogspot.com
Internet

12 words — < 1%

13 mutiarazuhud.blogspot.com
Internet

11 words — < 1%

14 ensiklopediasli.blogspot.com
Internet

9 words — < 1%

15 wardahcheche.blogspot.com
Internet

9 words — < 1%

16 a-research.upi.edu
Internet

8 words — < 1%

17 pakjalpidie.blogspot.com
Internet

8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON